

KOMPETENSI DAN PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Ni Kadek Hariani¹

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Luh Komang Merawati²

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Penulis Korespondensi: mettamera@unmas.ac.id

Ida Ayu Nyoman Yuliasuti³

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 desa di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 44 responden yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala BPD, ketua LPM dan ketua PKK. Metodologi penelitian kuantitatif dimana data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: akuntabilitas, dana desa, kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat

Abstract

This study aims to examine and obtain empirical evidence the effect of village apparatus competency, head village leadership, community participation, utilization of informaton technology and internal control system in accountability of village fund management. The population in this study were 8 villages in Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, using purposive sampling method, a sample of 44 respondents was obtained consist of the village secretary, head of planning affairs, head of financial affairs, head of BPD, chair of LPM, and head of PKK. The research methodology used is quantitative using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable village apparatus competency, head village leadership, and utilization of information technology have no significant effect on accountability of village fund management, community participation has positive effect on accountability of village fund management, while internal control system has negative effect on accountability of village fund management.

Keywords: *accountability, apparatus competency, village fund, community participation*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah sentra kekuatan politik yang dipersonifikasikan lewat kepala desa, dan perangkatnya. Mengingat pentingnya posisi pemerintah desa, sehingga sejak tahun 2015 dikucurkan sejumlah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di desa.

Tahun 2015 sebagai awal dimulainya pemberian dana desa dari pusat sebesar Rp 20,67 triliun atau sekitar Rp 280,3 juta per desa. Pada tahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 60 triliun atau sekitar Rp 800,4 juta per desa. Jumlah yang besar ini memberikan dampak pertanggungjawaban yang juga besar yang dipikul oleh perangkat desa. Tantangannya kemudian adalah bagaimana dana desa yang jumlahnya cukup besar itu bisa benar-benar membantu mewujudkan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa. Bukan sekedar menguap dan hanya memfasilitasi infrastruktur semata tanpa menciptakan akselerasi ekonomi.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Nafidah dan Anisa, 2017).

Berdasarkan hasil pemantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sejak Tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar. Beberapa penyebab korupsi dana desa yang disebutkan oleh ICW diantaranya adalah minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, kurangnya daya pengawasan dari pemerintah, masyarakat, dan desa, dan adanya intervensi atasan.

Kecamatan Selat yang terdiri atas delapan desa merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem sebagai penerima dana desa sejak tahun 2015 lalu. Realisasi serapan anggaran dana desa seharusnya adalah diatas 75 persen, namun 28 dari 75 desa di Kabupaten Karangasem justru berada di bawah 75 persen. Kecamatan Selat sendiri telah mencapai di atas 75 persen terkait serapan anggaran dana desa. Hal ini menjadikan Kecamatan Selat sebagai kecamatan dengan serapan dana desa terbaik di Kabupaten Karangasem.

Berkaitan dengan dana desa, sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019).

Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut (Fathoni, *et al.*, 2015). Semakin baik tokoh pemimpin dalam memimpin dan mengarahkan anggotanya maka kinerja anggota dan kinerja organisasi secara keseluruhan juga semakin meningkat. Untuk dana desa yang wajib bertanggung jawab dalam pengelolaannya adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa dikatakan sudah efektif bisa dilihat dari pengelolaan yang sudah tepat sasaran. Penelitian dari Pramayoga dan Ramantha, (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut teori keagenan untuk meminimalkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, maka perusahaan sebaiknya perlu menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan (Priswita dan Taqwa, 2019). Pemberian dana desa dengan jumlah yang cukup besar kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Partisipasi masyarakat sebagai representasi partisipasi publik adalah salah satu andalan utama demokrasi. Partisipasi publik tentunya mempengaruhi tujuan kebijakan publik. Namun, dalam demokrasi modern, keterlibatan warga negara dalam kebijakan publik telah menurun secara signifikan. Karena itu penting untuk mengembangkan praktik-praktik yang membangkitkan warga yang tidak aktif dan mengingatkan mereka tentang peran penting yang dapat mereka mainkan. Ketersediaan publik untuk campur tangan dalam kebijakan dapat meningkatkan kualitas dan kebermaknaan kehidupan publik. Hasil yang lebih adil dapat melegitimasi kebijakan dan meningkatkan *good*

governance (Carreira dan Vasconcelos, 2016). Melihat pentingnya partisipasi, tidak heran jika dalam proses pengelolaan keuangan terutama, sangat dibutuhkan partisipasi sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pengelolaannya. Dana desa yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa secara etis pula harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya (Naimah, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sektor, baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan yang diamanatkan dalam teori agensi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan perangkat desa bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Penelitian oleh Aziz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Dengan adanya sistem kontrol dari pemerintah, maka kepala desa beserta perangkat desa akan melakukan pengelolaan dana desa secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan semacam ini berguna untuk memastikan perangkat desa mengelola dana dengan benar. Penelitian oleh Rezkiyanti (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian

intern pemerintah berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Khususnya bagi pemerintah desa se-Kecamatan Selat, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pada pengelolaan dana desanya. Disamping itu hasil penelitian dapat memberikan informasi dan juga referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian mengenai pengelolaan dana desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan sebuah teori dari Jensen & Mekling (1976) mengenai hubungan yang terjadi antara pemilik perusahaan yang disebut dengan prinsipal, yang memberikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen (agen). Teori ini memberikan gambaran bahwa antara prinsipal dan agen memiliki kepentingan tersendiri yang mungkin saja berlawanan satu sama lain, namun agen sebagai pihak yang diberikan kepercayaan hendaknya mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan prinsipal.

Teori keagenan mencerminkan konflik antara prinsipal dan agen dalam beberapa hal terkait dengan masalah asimetri informasi tersebut, dimana agen lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan sehingga agen akan cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kepentingannya sendiri. Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu seorang prinsipal/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah/agen untuk mengelola alokasi dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Ismail *et al.*, 2016). Dalam *good governance*, akuntabilitas merupakan elemen penting dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparat sipil negara. Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Hasniati, 2016). Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara profesional, ketat dengan kontrol dan integritas (Umar *et al.*, 2018). Program dana desa bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan prioritas untuk membiayai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya program dan kegiatan terutama di bidang kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), fasilitas penyimpanan air untuk irigasi desa, produk unggulan desa, dan fasilitas olah raga desa (Yunita dan Christianingrum, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Tujuan Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu unit organisasi atau perusahaan. Kompetensi sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Kompetensi aparat desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pengembangan desa yang optimal (Anto & Amir, 2017).

Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan dipahami sebagai proses yang mempengaruhi langsung dimana pemimpin adalah entitas yang memotivasi yang menggerakkan atau mengarahkan pengikut untuk bertindak, yang akhirnya berakhir dengan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dianggap sebagai bentuk kontrol terpusat di mana satu individu memberikan kekuasaan dan pengaruh pada orang lain (Curral, *et al.*, 2016). Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kepala Desa yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa (Mada, *et al.*, 2017).

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika perangkat desa mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian masyarakat dengan mudah mengawasi dan menilai pelaksanaan penganggaran yang dilakukan. Ketika masyarakat tidak komplain terhadap apa yang terjadi maka proses legitimasi menjadi tercapai (Hindriani, *et al.*, 2019). Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran sesuai prioritas dan nilai aktual masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan (Dewi, 2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sebuah *enabler* yang keberadaannya diharapkan mampu mendukung jalannya proses bisnis pada sebuah

organisasi. Teknologi informasi dan komunikasi tidak saja digunakan pada lingkungan kerja perusahaan, tapi juga diterapkan pada lingkungan kerja aparaturnya pemerintahan. Teknologi informasi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik dan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi selain dapat meningkatkan pelayanan, juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, memudahkan proses penyusunan perencanaan dan pemantauan, serta evaluasi hasil pembangunan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern berisi serangkaian prosedur dan aturan yang perlu dijalankan oleh unsur-unsur organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan pelayanan, pengendalian intern meyakinkan proses pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kualitas pelayanan terjaga. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan sebagai ketentuan penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan pengendalian mencakup tindakan untuk mengatasi risiko serta kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin dan memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kebijakan merupakan arahan apa yang seharusnya dikerjakan dan menjadi dasar untuk penyusunan prosedur.

Kegiatan pengendalian yang berjalan dengan baik, akan memastikan bahwa unsur-unsur organisasi seperti sumber daya manusia dan peralatan akan dengan maksimal diarahkan dan digunakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Tadeko, 2017). Pengawasan dari pihak pemerintah juga diperlukan untuk memberikan evaluasi dan mencegah hal-hal tidak diinginkan yang kemungkinan terjadi dalam proses pengelolaan dana desa. Pengawasan dari pihak pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat menjadi langkah strategis upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa. Kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa secara tepat, yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku memberikan keyakinan

kepada prinsipal bahwa dana desa telah digunakan dengan tepat sasaran. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) dan Umar, dkk. (2018) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan adalah interaksi antara dua atau lebih anggota kelompok yang sering melibatkan penataan atau restrukturisasi situasi dan persepsi dan harapan anggota. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa, yang tentu saja segala kebijakan yang diterapkan akan diikuti oleh seluruh perangkat desa dan masyarakat. Oleh karena itu, memiliki kepala desa dengan visi dan misi yang sama dengan organisasi pemerintahan desa sangatlah penting. Penelitian yang dilakukan oleh Pramayoga dan Ramantha (2020) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Masyarakat dalam penelitian ini bertindak sebagai prinsipal yang berperan dalam memberikan pengawasan terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai agen. Tujuan dari adanya partisipasi aktif masyarakat adalah dapat tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat (Pahlawan *et al*, 2020). Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menunjukkan hak masyarakat sebagai prinsipal dapat terpenuhi dan secara otomatis akan tumbuh rasa swadaya dan rasa memiliki dari setiap masyarakat dalam upaya mengelola dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari adanya partisipasi aktif masyarakat adalah dapat tersalurkannya hak,

aspirasi, dan gagasan masyarakat. Hal yang tak kalah penting dari partisipasi adalah, masyarakat dapat membantu pemerintah pusat dalam memberikan pengawasan kepada aparat pemerintah desa. Hasil penelitian Pahlawan *et al.*, (2020), dan Naimah (2017) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah (Roshanti, dkk., 2014). Teknologi informasi kini berkembang dengan pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah.

Penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Yuliani (2019) dan penelitian Rezkiyanti (2019) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Selanjutnya akuntabilitas

publik hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari pemerintah dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan obyektif (Yulianti, dkk., 2016). Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah (Widyatama, *et al.*, 2017). Penelitian oleh Widyatama dan Diarespati (2017) dan Umar, *et al.*, (2018) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

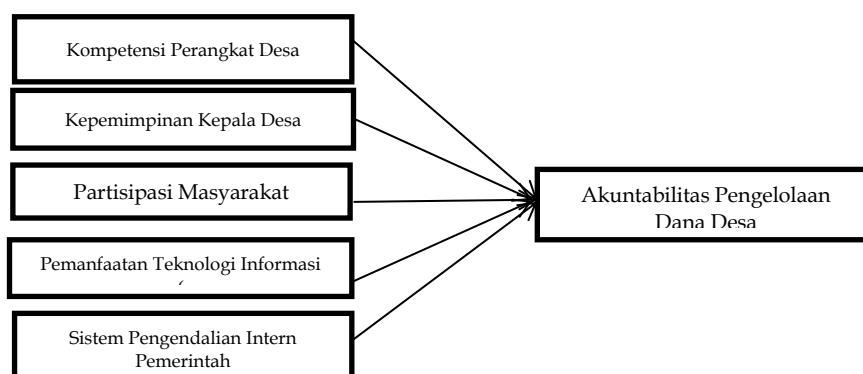
H₅: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggambarkan hubungan kausalitas. Desain penelitian menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Berdasarkan hipotesis penelitian, maka desain penelitian dapat digambarkan seperti Gambar 1.

Gambar 1. Desain Penelitian



Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa se-Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yaitu sejumlah 146 orang. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapat jumlah sampel dalam penelitian adalah sebanyak 48 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner, dimana peneliti menyebarkan kuesioner ke 8 desa se-Kecamatan Selat.

Tabel 1
Pengambilan Sampel Berdasarkan *Purposive Sampling*

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perangkat desa di seluruh desa se-Kecamatan Selat	146
2.	Tidak merupakan perangkat desa dengan posisi sebagai sekretaris desa, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan.	(49)
3.	Tidak tergabung dalam kelembagaan desa diantaranya ketua LPM, ketua BPD, dan ketua PKK	(49)
Jumlah Sampel		48

Sumber : Pemerintah Kabupaten Karangasem (*karangasemkab.go.id*), 2020

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian yang diamati. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan teknik analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KPD + \beta_2 KKD + \beta_3 PM + \beta_4 PTI + \beta_5 SPI + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

APDD	: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
<i>a</i>	: konstanta
KPD	: Kompetensi Perangkat Desa
KKD	: Kepemimpinan Kepala Desa
PM	: Partisipasi Masyarakat
PTI	: Pemanfaatan Teknologi Informasi
SPI	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
β_1 - β_7	: Koefisien regresi
<i>e</i>	: error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 48 orang. Namun terdapat 3 kuesioner yang tidak kembali dan 1 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria masa kerja minimal 1 tahun, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 orang

Tabel 2. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	48	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(3)	6,2%
Kuesioner yang tidak lolos kriteria	(1)	2,1%
Kuesioner yang layak digunakan	44	91,7%

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai *r pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,30. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian memiliki nilai *pearson correlation* di atas 0,30 sehingga seluruh pernyataan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016:47). Berdasarkan hasil uji reliabilitas seluruh variabel penelitian yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah lulus uji reliabilitas, yang dibuktikan dengan nilai koefisien *cronbach's alpha* yang lebih besar dari angka 0,60.

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, maka didapat hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

- 1) Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD) memiliki nilai *minimum* sebesar 32,00 dan nilai *maximum* sebesar 40,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 36,3182. Nilai standar deviasi sebesar 3,10867.

- 2) Variabel kompetensi perangkat desa (KPD) memiliki nilai *minimum* sebesar 40,00 dan nilai *maximum* sebesar 50,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 45,0682. Nilai standar deviasi sebesar 3,11335.
- 3) Variabel kepemimpinan kepala desa (KKD) memiliki nilai *minimum* sebesar 32,00 dan nilai *maximum* sebesar 40,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 36,1364. Nilai standar deviasi sebesar 3,09982. Variabel partisipasi masyarakat (PM) memiliki nilai *minimum* sebesar 19,00 dan nilai *maximum* sebesar 30,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,9318. Nilai standar deviasi sebesar 2,83990.
- 4) Variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki nilai *minimum* sebesar 22,00 dan nilai *maximum* sebesar 29,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,4091. Nilai standar deviasi sebesar 2,20273.
- 5) Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki nilai *minimum* sebesar 27,00 dan nilai *maximum* sebesar 40,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,4773. Nilai standar deviasi sebesar 3,01538.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa data penelitian ini telah lulus dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pada uji normalitas didapat nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Pada pengujian multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas didapat nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa didalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah data penelitian dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik, maka data penelitian dilanjutkan ke pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-value	Sig
(Constant)	11,301	4,614	0,019
KPD	0,177	0,160	0,276
KKD	0,333	0,185	0,080
PM	0,727	0,198	0,001
PTI	-0,038	0,214	0,859
SPIP	-0,393	0,151	0,013
Adj R ²	0,621		
F-Value		15,069	0,000 ^b

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = 11,301 + 0,177KPD + 0,333KKD + 0,727PM - 0,038PTI - 0,393SPIP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 11,301 menunjukkan apabila variabel Kompetensi Perangkat Desa (KPD), Kepemimpinan Kepala Desa (KKD), Partisipasi Masyarakat (PM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) bernilai konstan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) memiliki nilai positif sebesar 11,301.
- 2) Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) memiliki nilai koefisien sebesar 0,727, menunjukkan bahwa apabila variabel Partisipasi Masyarakat (PM) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) naik sebesar 0,727.
- 3) Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai koefisien sebesar -0,393, menunjukkan bahwa apabila variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, maka variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) turun sebesar 0,393.

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3, besarnya nilai *Adj R²* adalah sebesar 0,621. Hal ini berarti sebesar 62,1 persen variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat,

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 37,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Uji F

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 3, nilai signifikansi F adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel bebas yaitu kompetensi perangkat desa (KPD), kepemimpinan kepala desa (KKD), partisipasi masyarakat (PM), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh secara simultan atau serempak terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (APDD),

Uji t

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan hasil atau informasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji statistik pada variabel kompetensi perangkat desa (KPD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,177 dengan $t\text{-statistic} = 1,104$ dan signifikansi (α) $0,276 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_1 ditolak.
- 2) Hasil uji statistik pada variabel kepemimpinan kepala desa (KKD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,333 dengan $t\text{-statistic} = 1,797$ dan signifikansi (α) $0,080 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_2 ditolak.
- 3) Hasil uji statistik pada variabel partisipasi masyarakat (PM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,727 dengan $t\text{-statistic} = 3,667$ dan signifikansi (α) $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_3 diterima.
- 4) Hasil uji statistik pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,038 dengan $t\text{-statistic} = -0,179$ dan signifikansi (α) $0,859 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_4 ditolak.
- 5) Hasil uji statistik pada variabel sistem pengendalian intern (SPI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,393 dengan $t\text{-statistic} = 2,602$ dan signifikansi (α) $0,013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga H_5 ditolak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat terjadi karena kompetensi aparatur merupakan keahlian masing-masing individu yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Namun, kompetensi tidak menjamin perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana dengan baik. Kompetensi juga harus dibarengi dengan keterampilan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan dana desa. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan dana desa, dapat menjadi penyebab kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung dengan hasil kuesioner dimana sebagian responden Aparatur Pemerintah Desa latar belakang pendidikannya di dominasi lulusan SMA sehingga rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa akan mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyatama, dkk (2017), dan Diarespati (2017) yang menjelaskan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, yaitu perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan bendahara. Setiap perangkat desa mempunyai kewenangan tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan tidak berada dalam satu tangan, tetapi berada dalam satu tim sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan. Namun, hal ini justru menyebabkan peran nilai kepemimpinan sangat kecil bahkan diabaikan oleh aparat pemerintah desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahayani

(2017) yang memperoleh hasil bahwa tidak adanya bukti empiris bahwa kepemimpinan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Semakin baik partisipasi masyarakat, semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dapat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Prioritas usulan penggunaan dana desa adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat desa. Jika dilihat dari asas pengelolaan keuangan desa dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif akan lebih mengarahkan pada program program dan target sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mada, dkk., (2017), dan Dewi (2019) yang memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kecakapan perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi. Ketersediaan teknologi informasi yang canggih dan mumpuni namun tidak dibarengi dengan keterampilan dalam penggunaannya juga tidak akan memberikan dampak yang baik. Kurangnya kesadaran perangkat desa akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi menjadi faktor utama kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Di jaman ini, teknologi menjadi kebutuhan mutlak setiap organisasi dengan tujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dimengerti semua khalayak. Penting bagi perangkat desa untuk memahami hal tersebut dan mulai

mengikuti bimbingan dan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karyadi (2019) yang memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti hipotesis 5 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian intern yang dilakukan justru akan mendorong agen dalam hal ini pemerintah desa untuk mempercantik laporan pengelolaan dana desa, disebabkan karena dorongan untuk mencegah terjadinya temuan-temuan dari pihak pengawas. Agen akan melaporkan pertanggungjawaban yang baik, dan mengaturnya sedemikian rupa agar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga minim ditemukannya kesalahan-kesalahan. Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Purbasari dan Bawono (2017) serta Khasanah (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif pada akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil berbeda diperoleh pada variabel partisipasi masyarakat yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan peran partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun sebaliknya, variabel sistem pengendalian intern pada penelitian ini berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, seperti keterbatasan lokasi dan variabel penelitian. Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Prita Dila., Yuliani, Nur Laila. 2019. The Effect Of Human Resource Competency, Utilization Of Information Technology, Participation Budgeting, Supervision And Role Village Device On Accountability Village Fund Management. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*. Hal. 266-284.
- Anto, Rola Pola., Amir, Muhammad. 2017. Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency- Indonesia. *Journal of Business and Management*. Vol. 19 (11). hal. 66-71.
- Aziz, Muhammad Nur., Prastiti, Sawitri Dwi. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 6 (2). hal. 334-344.
- Carreira, V., Machado, J., and Vasconcelos, L. 2016. Engaging Citizen Participation – A Result of Trusting Governmental Institutions and Politicians in the Portuguese Democracy. *Social Sciences*, 5(3), hal. 40.
- Curral, L., Marques-quinteiro, P., Gomes, C., & Lind, P. G. 2016. Leadership as an Emergent Feature in Social Organizations : Insights from A Laboratory Simulation Experiment. *PLOS ONE*, hal. 1-16).
- Dewi, Ni Komang Ayu Julia Praba., Gayatri. 2019. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26 (2). hal. 1269-1298.
- Fathoni, Mukhamad., Suryadi., Rengu Stefanus. 2015. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 (1). hal. 139-146.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), hal. 15-30.
- Hindriani, Nuning., Hanafi, Imam., Domai Tjahjanulin. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. *Wacana*. Vol. 15 (3).
- Ismail, M., Widagdo A K. dan Agus Widodo 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), hal. 323-340.
- Jensen, M C. and Meckling W H. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial and Economics*, 3(4), hal. 305-360.
- Karyadi, Muh. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas

- Keuangan Desa. *Journal Ilmiah Rinjani*. Vol. 7 (2). hal. 33-46
- Khasanah, Risda Nur. 2020. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Universitas Pancasakti Tegal*. Vol. 14. (19). hal. 90-100.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*. Vol. 8. hal. 106-115.
- Mahayani, Ni Luh Ayu. 2017. Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 12 (2). hal. 129-144.
- Nafidah, L. N. and Anisa, N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10. (2), hal. 273-288.
- Naimah. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Pahlawan, Enggar Wahyuning., Wijayanti, Anita., Suhendro. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*. Vol. 2. (2). Hal. 162-172.
- Pramayoga, Ida Bagus., Ramantha, I Wayan. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *e-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 (1). hal. 226-237.
- Priswita, Febi., Taqwa, Salma. 2019. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 1. (4). hal. 1705-1722.
- Purbasari, Heppy., Bawono, Andy Dwi Bayu. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2. (2). hal. 102-108.
- Rezkiyanti, Yustika. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Akmen Jurnal Ilmiah*. Vol. 16. (1). hal. 17-24.
- Roshanti, Arina., Sujana, Edy., Sinarwati, Kadek. 2014. Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan Ti, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2. (1). Hal. 1-12.
- Tadeko, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai). *Katalogis*. Vol. 5. (2). hal. 104-115.

- Umaira, Siti., Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 4 (3). hal. 471-481.
- Umar, H., Usman, S. and Purba, R. B. R. 2018. The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*. Vol. 9. (7), hal. 1525–1531.
- Widyatama, Arif., Novita, Lola., Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2. (2). hal. 1-20.
- Yulianti, Widia., Kamaliah., Rasuli. 2019. Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*. Vol. 27. (4). hal. 386-398.
- Yunita, Anggraeni., Christianingrum. 2018. Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Integrated Journal of Business and Economics*. Vol. 2. (1). hal. 99-103.